

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, penyampaian kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia mengalami transformasi seiring dengan berkembangnya media digital. Jika sebelumnya kritik terhadap berbagai kebijakan publik lebih banyak disampaikan melalui laporan berita cetak, program televisi, maupun tajuk editorial yang bersifat formal, kini kritik tersebut juga hadir melalui berbagai platform digital yang menawarkan pola komunikasi yang lebih dialogis, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat (Nasrullah, 2024). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menghadirkan saluran baru dalam penyebaran informasi, tetapi juga menghadirkan pola komunikasi baru yang memungkinkan pesan-pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan disampaikan secara lebih mendalam melalui argumentasi, diskusi, dan penyajian fakta. Dengan demikian, media digital telah berkembang menjadi sarana penyebaran informasi, juga menjadi ruang komunikasi publik yang memperluas penyampaian kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam kehidupan demokrasi.

Salah satu bentuk transformasi penyampaian informasi dalam jurnalisme digital adalah hadirnya podcast sebagai medium komunikasi yang semakin banyak dimanfaatkan oleh media massa. Berbeda dengan format pemberitaan konvensional yang cenderung bersifat singkat dan formal, podcast menawarkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan suatu isu melalui percakapan, argumentasi, dan penjelasan yang lebih mendalam. Karakteristik tersebut menjadikan podcast sebagai media penyampaian informasi, serta ruang diskusi yang memungkinkan berbagai persoalan publik, termasuk penyelenggaraan kekuasaan, dibahas secara lebih komprehensif. Dalam konteks komunikasi politik, perkembangan podcast menunjukkan adanya perubahan cara media menyampaikan pesan-pesan jurnalistik kepada masyarakat, yaitu dari penyampaian informasi yang berorientasi pada pelaporan menuju penyampaian yang juga memberi ruang bagi penjelasan, analisis, dan pembentukan argumentasi (Berry, 2016).

Salah satu media yang memanfaatkan format podcast sebagai bagian dari praktik jurnalisme digital adalah Podcast Bocor Alus Politik yang diproduksi oleh Tempo. Podcast ini secara konsisten membahas berbagai isu politik nasional melalui penyajian hasil liputan, data, serta analisis yang dikemas dalam bentuk diskusi yang komunikatif dan mudah dipahami oleh khalayak. Berbeda dengan pemberitaan konvensional yang cenderung menyampaikan informasi secara ringkas, Podcast Bocor Alus Politik memberikan ruang yang lebih luas untuk membangun argumentasi, menjelaskan konteks suatu peristiwa, serta menghubungkan berbagai fakta sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih komprehensif. Karakteristik tersebut menjadikan Podcast Bocor Alus Politik menarik untuk dikaji sebagai objek penelitian komunikasi, khususnya dalam melihat bagaimana pesan-pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dibangun melalui praktik wacana dalam media digital.

Di antara berbagai episode yang dipublikasikan, episode "***Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan***" dipilih sebagai objek penelitian karena secara khusus mengangkat fenomena kemarahan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan melalui pembahasan mengenai demonstrasi, fungsi lembaga legislatif, serta respons aparat terhadap aksi massa. Episode ini tidak hanya menyampaikan fakta-fakta peristiwa, tetapi juga membangun argumentasi melalui penyusunan narasi, pemilihan bahasa, serta penyajian data yang membentuk pemaknaan tertentu terhadap persoalan yang dibahas. Melalui karakteristik tersebut, episode ini menjadi relevan untuk dikaji karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana pesan-pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah tayangan podcast sebagai praktik komunikasi politik.

Penelitian ini tidak berfokus pada Tempo sebagai institusi media maupun praktik jurnalismenya secara umum, melainkan pada pesan-pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang terdapat dalam episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan". Pesan kritik tersebut tercermin melalui penyusunan narasi, pilihan diksi, pengembangan argumentasi, penyajian data, serta hubungan antargagasan yang membangun kritik terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang terdapat

dalam tayangan Podcast Bocor Alus Politik episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan" dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough.

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan publik. Kritik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mendorong terciptanya penyelenggaraan kekuasaan yang lebih akuntabel. Menurut Habermas (1989), ruang publik merupakan arena diskusi yang memungkinkan warga negara menyampaikan argumentasi secara rasional mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam konteks tersebut, podcast politik dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ruang publik digital yang mempertemukan informasi, argumentasi, dan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, pesan-pesan kritik yang disampaikan dalam podcast menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk diskursus publik mengenai berbagai persoalan kenegaraan.

Untuk memahami bagaimana pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam tayangan podcast, diperlukan pendekatan yang tidak hanya memandang bahasa sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Fairclough memandang bahwa bahasa tidak bersifat netral, melainkan dapat merepresentasikan kepentingan, ideologi, serta relasi kekuasaan yang bekerja di balik sebuah teks (Fairclough, 2023). Melalui analisis terhadap dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana pesan-pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dikonstruksi dalam episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan".

Penelitian mengenai Podcast Bocor Alus Politik telah dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Helni dkk. (2025) melalui penelitian berjudul Konstruksi Realitas Politik Hukum Indonesia dalam Podcast Bocor Alus Politik Tempo.co menjelaskan bahwa podcast tersebut berperan dalam mengonstruksi realitas politik

hukum melalui penyajian informasi yang kritis terhadap dinamika kebijakan publik. Selanjutnya, Rahmadani & Yuanita (2026), dalam penelitian Konstruksi Wacana Podcast Bocor Alus Politik "Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI": Perspektif Teun A. Van Dijk mengungkap bahwa struktur wacana yang dibangun dalam podcast merepresentasikan relasi aktor politik, kepentingan elite, dan praktik lobi dalam proses pembentukan kebijakan. Sementara itu, Siahaan & Gafari (2026), melalui penelitian Representasi Pemerintah dalam Diskursus Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera pada Podcast Bocor Alus Politik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough menunjukkan bahwa representasi pemerintah dibentuk melalui pilihan bahasa, praktik diskursif, dan konteks sosial yang mencerminkan relasi antara bahasa dan kekuasaan. Selain itu, Susanto (2023), dalam penelitian Podcast "Bocor Alus Politik Tempo": Podcast Tempo Versus Erick Thohir menyoroti podcast sebagai ruang komunikasi politik yang membentuk opini publik melalui penyajian kritik dan argumentasi terhadap aktor politik. Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa Podcast Bocor Alus Politik telah dikaji dari perspektif konstruksi realitas, analisis wacana, representasi pemerintah, serta komunikasi politik.

Penelitian yang menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough telah banyak diterapkan dalam mengkaji berbagai bentuk media digital. Samsuri & Mulawarma (2022), melalui penelitian berjudul Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough menjelaskan bahwa penggunaan istilah dalam pemberitaan tidak bersifat netral, melainkan merepresentasikan ideologi tertentu yang dibangun melalui praktik kebahasaan dan konteks sosial. Selanjutnya, Indah Suryawati (2021), dalam penelitian Politik Entertainment Selebriti Parlemen Pusat dalam Konstruksi Media Online (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough) menemukan bahwa media membangun konstruksi politainment terhadap anggota parlemen melalui representasi bahasa yang sarat dengan kepentingan ideologis dan relasi kekuasaan. Penelitian lain oleh Panggabeh dkk.(2025), yang berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada YouTube Helmy Yahya Bicara "Ngobrol Bisnis dengan Sultan Cilik 1 Milyar" menunjukkan bahwa model Fairclough mampu mengungkap makna yang tersembunyi di balik pilihan bahasa,

praktik produksi teks, serta konteks sosial dalam konten media digital. Sementara itu, Putri (2024) melalui penelitian *Campur Tangan Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024* dalam Editorial Tempo (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Editorial Tempo Edisi 10 Januari 2024) menjelaskan bahwa editorial media membangun kritik terhadap dugaan campur tangan kekuasaan melalui representasi bahasa, praktik diskursif, dan praktik sosial yang mencerminkan hubungan erat antara media, ideologi, dan kekuasaan. Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk mengungkap relasi bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam berbagai bentuk media digital, seperti berita daring, media online, YouTube, maupun editorial media.

Penelitian mengenai kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam media digital juga telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Nigsih Dkk. (2025) melalui penelitian berjudul *Representasi Kritik terhadap Kekuasaan dan Perlawanan Digital dalam Video TikTok "Indonesia Gelap"* menjelaskan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan sekaligus membangun bentuk perlawanan digital melalui representasi simbol, bahasa, dan narasi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Ikhwan & Wardani (2022) dalam penelitian *Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial YouTube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo* menunjukkan bahwa media digital, khususnya YouTube, menjadi ruang alternatif bagi masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik, membangun wacana tandingan, serta melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik, penyampaian kritik politik, dan perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan media digital tidak hanya mengubah bentuk penyampaian informasi politik, tetapi juga menghadirkan cara baru dalam menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Podcast sebagai salah satu produk jurnalisme digital menjadi ruang komunikasi yang memungkinkan kritik dibangun melalui narasi,

argumentasi, dan pilihan bahasa yang memengaruhi cara khalayak memahami suatu persoalan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dikonstruksi dalam tayangan Podcast Bocor Alus Politik episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan" menggunakan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam memahami konstruksi pesan kritik terhadap kekuasaan pada media digital.

1.2 Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang telah di paparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. Berangkat dari pernyataan tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian yang berjudul Kritik Kekuasaan Dalam Tayangan Podcast Bocor Alus Tempo : Studi Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Pada Episode “Kemarahan Publik Terhadap Kekuasaan” sebagai berikut:

Bagaimana pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam tayangan Podcast Bocor Alus Politik episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan" di analisis berdasarkan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis bagaimana pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam tayangan Podcast Bocor Alus Politik episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan" menggunakan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang

komunikasi politik dan kajian media digital melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai analisis pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam media digital, khususnya pada konten podcast sebagai salah satu bentuk jurnalisme digital yang semakin berkembang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

A. Bagi Akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang memiliki ketertarikan pada kajian komunikasi politik, media digital, podcast, serta Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

B. Bagi Praktisi Media : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana media digital, khususnya podcast, membangun dan menyampaikan pesan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan melalui praktik kewacanaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi media dalam menyajikan informasi politik secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.

C. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bersikap kritis dalam menerima dan menafsirkan pesan-pesan politik yang disampaikan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami bagaimana bahasa digunakan dalam membentuk opini publik serta merepresentasikan praktik kekuasaan dalam kehidupan demokrasi.